

RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA OLEH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA BENGKULU PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH



ROBY ASAD ALMUSARRY

**RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA OLEH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA BENGKULU PERSPEKTIF SIYASAH
DUSTURIYAH**



SKRIPSI

Di Ajukan Sebagai Syarat Untuk Pengambilan Gelar
Sarjana Hukum (SH) Di Bidang Hukum Tata Negara

Oleh :

Roby Asad Almusarry

NIM : 1811150125

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
2023 M/1445H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Roby As'ad Almusarry, NIM. 1811150125 yang berjudul "Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bengkulu Perspektif Syariah Dsturiyah" Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki saran pembimbing I dan pembimbing II Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, September 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. John Kenedi, M. Hum
NIP. 196205031986031004

Etry Mike, MH
NIP. 198811192019032010



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Kaden Fatmah, Pagar Dewatelep. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: **Roby As'ad Almusarry, NIM:**
1811150125 yang berjudul **Rencana Aksi Nasional Hak Asasi**
Manusia Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi

Manusia Bengkulu Perspektif Siyasan Dusturiyah Program Studi
Hukum Tata Negara, telah diuji dan dipertahankan di depan **Tim**
Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
(UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada:

Hari Rabu
Tanggal 11 Oktober 2023

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan
sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam
Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, 2023M

1444H

Dekan,

Dr. Suwårjin, MA

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. H. John Kenedi, M.Hum

Anita Niffilayani, M.H.I

NIP: 196205031986031004

NIP: 198801082020122004

Penguji I

Penguji II

Fauzan, MH

A. Majid Al, M.Si

NIP: 197707252002121003

NIP: 196504011986021007

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul **"Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Perspektif Siyash Dusturiyah"** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipa secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskahnya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Berdasarkan skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas Nama saya dan Nama Dosen Pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2023

Mahasiswa yang menyatakan,


METERAI
TEMPEL
JF8AKX671885827
Almusarry
NIM. 1811150125

MOTTO

**SETIAP HARI YANG DILALUI HARUS MENDAPATKAN
HASIL WALAU ITU KECIL
(ROBY AS'AD ALMUSARRY)**



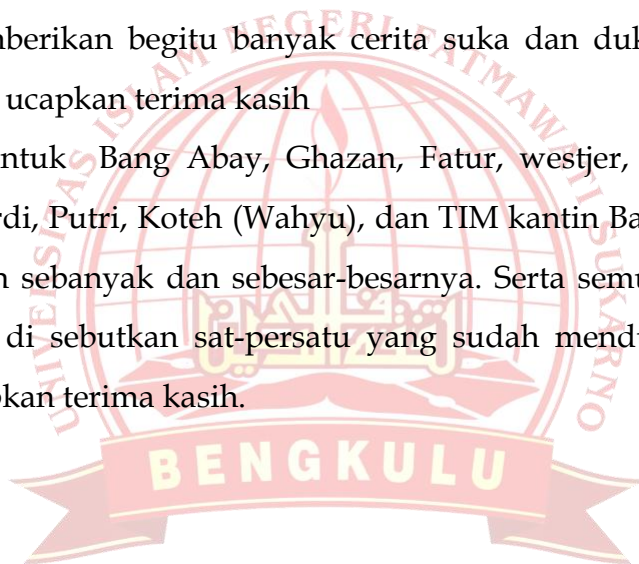
HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Diri ini tiada daya tanpa kekuatan dari-Mu. Engkau telah memberikan kekuatan, serta memberikan bekal kepadaku ilmu pengetahuan. Sholawat serta salam kepada suri tauladanku Nabi Muhammad SAW. Semoga syafa'atmu dapat kurasakan dipenghujung hari ini.

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tuaku, bapak (Ujang Azwari) dan Mamak (Eva susanti) yang selalu membimbing dan memberikan do'a serta semangat untuk saya agar tidak pernah menyerah dalam segala hal.
2. Untuk kedua saudaraku Adikku Indah Dwinta Azwari, wanita dan Habid Pranaja Azwari terima kasih atas segala bentuk bantuan yang telah di berikan.
3. Teruntuk teman Hidupku yang insyaallah selamanya Fahriza terimah kasih sudah membantuh semangat yang sangat luar biasa aku ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya.
4. Untuk sanak keluarga besarku yang selalu mendukung dan mendoakan (baik dari keluarga besar Bapak dan keluarga besar Ibu).
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajar dan mendidik selama ini dengan penuh kesabaran di Fakultas syariah dan Hukum.
6. Bapak dan Ibu Staf Fakultas Syariah dan hukum yang telah membantu saya dalam mengurus segala bentuk skripsi ini.

7. Teruntuk Prodi HUKUM TATA NEGARA Dan abang kami,bapak kami pak Ifansyah terima kasih banyak atas segalanya serta dosen Hukum Tata negara yang selalu memnberikan pengajaran dan pengalaman yang begitu berharga untuk saya.
8. Teruntuk Keluarga besar HUKUM TATA NEGARA 2018 terima kasih atas rasa kelurga yang di berikan.
9. Untuk Kelas HTN E kelas yang luar biasa yang telah memberikan begitu banyak cerita suka dan duka bersama, saya ucapkan terima kasih
10. Teruntuk Bang Abay, Ghazan, Fatur, westjer, Riki, Bima, Deardi, Putri, Koteh (Wahyu), dan TIM kantin Baroka.terima kasih sebanyak dan sebesar-besarnya. Serta semua yang tak bisa di sebutkan sat-persatu yang sudah mendukung saya ucapkan terima kasih.



ABSTRAK

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bengkulu Perspektif Siyasaah Dusturiyah oleh Roby As'ad Almusarry NIM 1811150125

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: 1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bengkulu. 2. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bengkulu menurut Siyasaah Dusturiyah, Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus dengan peneliltian lapangan, data-data yang didapat melalui wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen. Tehnik observasi wawancara, untuk menganalisa data penulis mendeskripsikan melalui hasil wawaancara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bengkulu. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa 1.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu belum berjalan secara baik karena ada beberapa kendala yaitu: sumber daya manusia panitia RANHAM masih banyak yang belum memahami konsep HAM secara baik dan benar, belum adanya persamaan persepsi terhadap HAM sehingga masih cenderung beranggapan bahwa RANHAM merupakan kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM saja bukan

tupoksi daerah Kabupaten/Kota dan elemen masyarakat. Sarana prasarana penunjang pelaksanaan RANHAM banyak yang tidak tersedia sehingga sering pelaksanaan RANHAM terhambat karena hal-hal yang bersifat teknis, anggaran pelaksanaan kegiatan RANHAM terbatas sehingga tidak bisa menjangkau daerah-daerah kepulauan terluar/terpencil dan daerah-daerah pegunungan, kesadaran dari panitia RANHAM Kabupaten/Kota untuk menyampaikan laporan kegiatan RANHAM kurang sehingga sekretariat RANHAM sulit memantau pelaksanaan RANHAM di Kabupaten / Kota. Kajian Siyasa Dusturiyah menyerahkan semuanya kepada umat islam untuk membentuk dan mengatur pemerintahan serta menyusun konstitusi dengan perkembangan zaman dan konteks sosial masyarakatnya. Dalam hal ini dasar-dasar hukum islam lainnya, seperti *ijma'*, *qiyas*, *istikhsan*, *maslaha mursalah*, dari *'Uruf* memegang peranan penting dalam perumusan konstitusi dalam RANHAM. Hanya saja penerapan dasar-dasar tersebut tidak boleh bertentangan dengannya prinsip-prinsip pokok yang telah digariskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Kata kunci: RANHAM, Kanwil Kemhumham Provinsi Bengkulu dan Siyasa Dusturiyah

ABSTRACT

National Human Rights Action Plan By Regional Office of Bengkulu Ministry of Law and Human Rights Perspective of Siyasaah Dusturiyah by Roby As'ad Almusarry NIM 1811150125

There are two issues studied in this thesis, namely: 1. Implementation of the National Action Plan for Human Rights by the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of Bengkulu Province. 2. Implementation of the National Human Rights Action Plan by the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of Bengkulu Province according to Siyasaah Dusturiyah, This type of research is a qualitative research based on case studies with field research, data obtained through interviews, field notes, photographs and document. Interview observation techniques, to analyze data the author describes through the results of interviews at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of Bengkulu Province. Based on the results of the research, it can be concluded that 1. The Bengkulu Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights has not run well because there are several obstacles, namely: the human resources of the RANHAM committee are still many who do not understand the concept of human rights properly and correctly, there is no common perception of human rights so that still tend to think that RANHAM is only the work of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights, not the main tasks of the Regency/City area and elements of society. Many supporting infrastructure for

the implementation of RANHAM are not available so that often the implementation of RANHAM is hampered due to technical matters, the budget for implementing RANHAM activities is limited so that it cannot reach the outermost/remote island areas and mountainous areas, the awareness of the Regency/City RANHAM committee Municipalities to submit RANHAM activity reports are lacking so that the RANHAM secretariat finds it difficult to monitor the implementation of RANHAM in Districts/Cities. Siyasa Dustiryah's study left everything up to Muslims to form and manage the government and draft a constitution with the times and the social context of society. In this case other Islamic legal foundations, such as ijma', qiyas, istikhsan, maslaha mursalah, from 'Uruf play an important role in the formulation of the constitution in RANHAM. It's just that the application of these principles must not conflict with the main principles outlined in the Qur'an and Sunnah.

Keywords: RANHAM, Regional Office of Kemhumham Bengkulu Province

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “implikasi yuridis terhadap pembatasan kebebasan pers dalam kuhp baru perspektif siyasah dusturiah” Skripsi ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan, arahan dan masukan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, sebagai wujud rasa hormat penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak berikut ini.

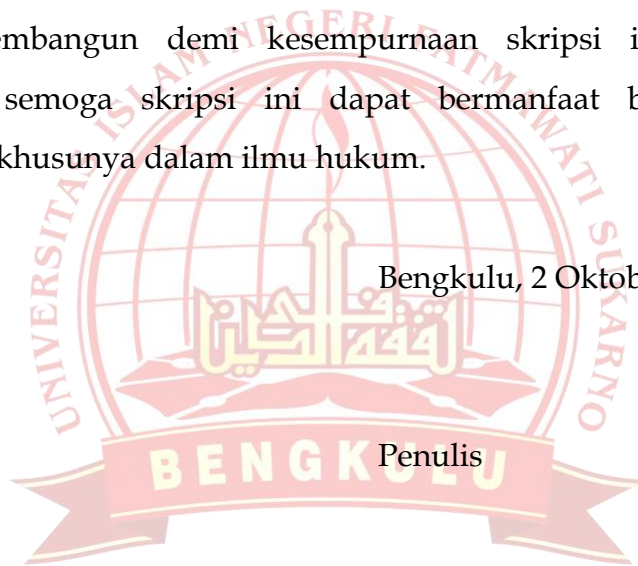
1. Prof. Dr. H. John kanedi, S.H, M.H. sebagai pembimbing 1 yang telah membimbing dan memberi arahan serta pengetahuan demi kesempurnaan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
2. Etry mike, M.H sebagai pembimbing 2 sekaligus Penasehat Akademik (PA) penulis yang telah membimbing memberi arahan serta pengetahuan demi kesempurnaan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
3. Ifansyah Putra, M.Sos selaku ketua program studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak/Ibu dosen Program Studi Hukum Tata Negara UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan.

5. Semua pihak yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebut satu per satu.

Semoga bantuan dari semua pihak yang disebutkan di atas mendapatkan pahala serta balasan dari Allah SWT. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan, khususnya dalam ilmu hukum.

Bengkulu, 2 Oktober 2023

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan penelitian.....	10
E. Penelitian terdahulu.....	11
F. Metode penelitian.....	17
G. Sistematika penulisan.....	21
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Teori Kewenangan.....	23
B. Teori hak Asasi Manusia.....	30
C. Teori Siyasa Dusturiah.....	39
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.....	49

B. Sejarah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu.....	50
C. Visi, Misi dan Tata Nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.....	51
D. Satuan Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Bengkulu.....	56
E. Struktur Organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Bengkulu.....	56

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bengkulu.....	57
B. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bengkulu menurut Siyasah Dusturiyah.....	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN